



Analisis Dampak Penggunaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah

Moh. Mudassir Ali ^{1✉}, Mutiara Sarifah Hidayat ²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli

²Fakultas Hukum, Universitas Madako Tolitoli

Informasi Artikel

History of Article

Received 10 Februari 2024

Accepted 10 Maret 2024

Published 15 Maret 2024

Kata Kunci:

Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

Penelitian ini bermaksud mengetahui penggunaan modal pemerintah atas perkembangan keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2009-2019 dan menentukan kesesuaian besaran penggunaan modal pemerintah terhadap seluruh konsumsi Pemerintahan umum Sulawesi Tengah tahun 2009-2019 berdasarkan Petunjuk Pelayanan Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif sehingga mengarah pada objek langsung yang menggambarkan pada objek penelitian atas dasar fenomena yang muncul (Nawawi dan Martini, 1996). Umumnya data pada penelitian ini menggunakan data skunder bersifat kuantitatif meliputi, realisasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. Metode analisis regresi sederhana dan analisis proporsi digunakan pada kajian ini yang kemudian hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada rentang waktu 2009-2019 berpengaruh negatif sehingga tidak signifikan oleh belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa proporsi belanja modal minimal 21 persen atas belanja modal APBD, hal ini tidak mampu tercapai dimana belanja modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini hanya 15,94 persen proporsi yang berbeda sehingga pengalokasiannya hanya mampu pada belanja barang dan jasa, olehnya itu pertumbuhan ekonomi hanya di dorong dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.

This research aims to determine the use of government capital for the regional financial development of Central Sulawesi Province for the 2009-2019 period and determine the suitability of the amount of government capital use for all Central Sulawesi general government consumption in 2009-2019 based on Domestic Service Instructions number 13 of 2006. This research uses the method quantitative descriptive so that it leads to direct objects that describe the research object on the basis of emerging phenomena (Nawawi and Martini, 1996). Generally, the data in this research uses quantitative secondary data, including the realization of the Central Sulawesi Provincial Government's APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) and GRDP (Gross Regional Domestic Income) on the basis of constant prices. Simple regression analysis methods and proportion analysis were used in this study and the results of the research showed that the economic growth of Central Sulawesi Province in the 2009-2019 period had a negative and insignificant effect on capital expenditure carried out by the government. Permendagri number 13 of 2006 states that the proportion of capital expenditure is a minimum of 21 percent of APBD capital expenditure, this cannot be achieved where the capital expenditure of the regional government of Central Sulawesi Province is currently only 15.94 percent, a different proportion so that the allocation can only be allocated to expenditure on goods and services. Therefore, economic growth is only driven by capital expenditure carried out by the current government.

✉ Corresponding Penulis :

Alamat: Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli

E-mail: mohmudassirali@umada.ac.id

Latar Belakang Penelitian

Langkah-langkah yang di tempuh pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah salah satunya melalui kebijakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Permendagri nomor 13 tahun 2006 merupakan regulasi dari bentuk pengeluaran pemerintah yang diatur, dimana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan pemerintah daerah pada periode tahunan yang kemudian dibahas serta disetujui bersama-sama oleh DPRD, yang kemudian dapat menjadi bagian dari peraturan daerah itu sendiri. Belanja langsung merupakan bagian dari belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program yang merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang telah tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan SKPD yang telah tertuang dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, selain itu juga belanja langsung ini terbagi dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Motivasi Penulisan Makalah

Pemerintah dianggap mampu menyusun anggaran dalam proses belanja pembangunan daerah sehingga hal ini merupakan bagian dari faktor umum dalam menekan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Motivasi penulis dalam penulisan makalah melihat dimana pemerintah daerah saat ini harus mampu secara profesional untuk menyelesaikan segala persoalan internal sampai dengan external di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBN yang ada, dengan pengalokasian program tepat sasaran diyakini akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara makro di wilayah-wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu cepat, terlepas dari kesejahteraan masyarakat secara langsung, serta adil dan makmur melalui peran kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah dari pembelanjaan keuangan Negara. Pertumbuhan endogen, memberi pengertian baru bahwa pemerintah dalam mengatur pengeluaran harus mampu memprioritaskan kepentingan rakyat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih terpengaruh dari sisi produktifitas (Barro, 1990). Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang di anggap paling mampu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari bawah hingga ke atas, dengan bentuk alokasi belanja modal yang mengarah pada perbaikan fasilitas sarana dan prasarana publik untuk satu tahun berikutnya. Selain itu dapat menjadi aset suatu daerah juga menjadi alat kelancaran dalam memenuhi aktifitas masyarakat pada pemenuhan ekonomi tiga tingkatan yaitu atas, menengah dan bawah.

Permasalahan

Fenomena inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pada triwulan I tahun 2019 dengan angka 5,59 persen, dianggap lebih besar dari triwulan IV tahun 2019 dengan angka 6,46 persen. Faktor *base-effect* menjadi faktor tingginya tingkat inflasi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu -0,59 persen, namun jika di total secara keseluruhan hal ini masih tergolong inflasi pada kategori rendah. Produksi bahan makanan yang kemudian meningkat, serta distribusi barang-barang bangunan yang lancar, belum membuat kondisi menjadi normal akibat masih adanya tekanan inflasi yang terjadi akibat kondisi beberapa permintaan kebutuhan pokok masyarakat ikut mengalami penurunan secara signifikan. Munculnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang penganggarannya dilaksanakan mulai Tahun 2009 pada Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data laporan realisasi Tahun anggaran 2009 belanja modal sebesar 74,88 persen hingga Tahun 2018 pada saat mengalami bencana

Dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan pembanguana daerah melalui kegiatan-kegiatan serta program-program yang di rencanakan tiap tahunnya, terbukti dengan realisasi anggaran mencapai 94,14 persen dari total APBN yang terserap, pada akhirnya mampu melebihi target secara nasional dimana 90 persen. Pada akhir tahun 2018, di ketahui bersama bahwa fenomena bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dimana Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala serta Kota Palu baru menyerap 82,51 persen dana APBN saja dan belum mendekati target nasional 90 persen, oleh karena itu, akibat fenomena bencana alam yang terjadi mempengaruhi pelaksanaan belanja modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tinjauan Pustaka Singkat

Menurut Keynes, peran pemerintah dalam mengendalikan perekonomian pasar masih umum untuk di butuhkan, terlepas dari campur tangan yang di lakukan oleh pemerintah serta peran dari tingkat atas sampai kebawah masih sangat di butuhkan untuk mencapai level kesempatan kerja yang sama di pasar bebas, terlepas dari kestabilan tingkat ekonomi yang akan diwujudkan (Sukirno, 2000). Kegiatan ekonomi akan terus berjalan dari tahun ke tahun yang kemudian akan mempengaruhi kesempatan kerja pada periode tertentu, begitupun dengan pengangguran serta tingkat harga yang akan berimplikasi serius pada tingkatan perekonomian. Teori Rostow dan Musgrave dalam (Boediono, 1999), mengembangkan suatu teori hubungan dimana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik itu perkembangan akan melalui tahapan pembangunan ekonomi secara konprehensif pada tahapan-tahapan yang berbeda-beda seperti awal, menengah hingga tahap lanjut. Pada teori Wagner mencoba memperlihatkan mengenai fenomena yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu GNP, jika di persentasekan cukup besar karena didasarkan pada negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang yang mengamatinya, lain halnya dengan teori Peacock dan Wiseman yang mengemukakan dimana pemerintah senantiasa berupaya untuk memperluas pengeluaran sehingga membuat rakyat mengeluh atas pajak yang mustinya di bayarkan selain karena besarnya nilai pajak yang di keluarkan hanya untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang cukup besar, sehingga merupakan dasar dari teori pemungutan suara yang di anggap paling terbaik (Sukirno, 2000).

Temuan Sebelumnya Yang Perlu Dikembangkan

Pada penelitian Hermawati (2018) yang dilakukan, dengan judul “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di daerah Provinsi Kalimantan Utara”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan ekonomi melalui belanja modal yang di lakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara berpengaruh signifikan pada belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal tanah. Adapun tidak berpengaruh signifikan ada pada belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal lainnya. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan seiring dengan pemerintahan yang produktif dalam segala hal, salah satunya melalui rencana strategis jangka panjang pada penyediaan barang-barang ekonomi yang umumnya di perlukan oleh masyarakat terlepas pada kemajuan teknologi, adanya perbaikan peningkatan pada struktur kelembagaan diikuti dengan idiologis yang sejalan dengan pemerintahan daerah pada Provinsi Kalimantan Utara. Adapun pandangan para ahli, khususnya para ekonomi klasik menyebutkan terdapat empat faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain, faktor banyaknya penduduk, adanya persediaan barang-barang modal, terdapat lahan yang luas diikuti dengan SDA (Sumber Daya Alam) yang masih terjaga ke asriannya, kemudian pada kemajuan teknologi yang di milikinya. Sadar akan peningkatan ekonomi yang masih memerlukan banyak faktor, umumnya pada teori klasik ini masih menekankan pada bagaimana agar pertumbuhan penduduk terus berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi, (Kuznets dalam Jhingan, 2000).

Paragraf Tujuan Penelitian

Pada bagian riset ini, ingin mengetahui apa saja yang mungkin bisa mempengaruhi pemerintah dalam melakukan belanja modal dalam peningkatan ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang di cerminkan oleh laju PDRB periode tahun 2009-2019 dengan menggunakan analisis regresi linier dan analisis proporsi, hal ini di maksudkan agar pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) mampu mencerminkan kebijakan pemerintah saat ini, dengan pendalaman teori-teori terkait pemerintah mengatur pengeluarannya khususnya pada teori ekonomi mikro serta makro, (Boediono, 1999). Kegiatan belanja modal yang dimaksudkan yakni dimana pemerintah dalam melakukan pengeluaran rutin tahunan melalui dana APBN juga APBD melalui belanja langsung, dimana dalam Erlina dan Rasdianto (2013), mengemukakan bahwa belanja modal pada dasarnya adalah merupakan suatu pengeluaran yang bertujuan menjadi aset pada kapasitas jumlah anggaran yang ada, sehingga mampu memberi manfaat kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi pada peningkatan pembangunan daerah melalui pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Riset yang ada pada artikel ini menggunakan langkah-langkah metode deskriptif yang kemudian mengarah pada objek langsung yang kemudian menggambarkan dari pada objek penelitian atas dasar fenomena yang muncul (Nawawi dan Martini, 1996). Penelitian ini menggunakan data skunder bersifat kuantitatif yakni, realisasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang ada pada pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. Analisis data dilakukan dengan menerapkan analisis pada percobaan regresi sederhana bersama analisis pada percobaan proporsi dengan penggunaan program komputernisasi SPSS, melalui oprasional variable meliputi pengeluaran pemerintah dan juga belanja modal, Permendagri pada nomor 13 di tahun 2006, pertumbuhan ekonomi. Mengikuti dari judul penelitian serta kebutuhan informasi yang digunakan pada penelitian ini, untuk itu lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan pembangunan daerah melalui ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya diupayakan mengalami perbaikan sehingga saat ini telah mencapai 10,91 persen pada tahun 2019. Dari hasil PDRB yang telah di distribusikan pada tahun 2019 dimana harga konstan menjadi dasar elemen-elemen pembentukan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah oleh 21 sektor yang ada melalui PDRB. Perubahan struktur pembentukan perekonomian tidak terlepas dari adanya perbedaan dari sektor-sektor yang tumbuh saat ini.

Tabel 1.1
Belanja Modal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2009	Rp.270.648.958.814,00	Rp.202.669.581.134,00	74,88
2010	Rp.224.770.757.458,00	Rp.203.792.300.548,09	90,67
2011	Rp.319.982.000.853,92	Rp.208.496.794.160,00	65,16
2012	Rp.352.070.204.081,02	Rp.324.862.320.287,00	92,27
2013	Rp.376.142.400.455,43	Rp.355.519.046.118,00	94,52
2014	Rp.289.839.412.425,00	Rp.276.831.808.150,00	95,51
2015	Rp.492.541.885.205,00	Rp.442.524.325.052,00	89,85
2016	Rp.543.466.042.164,72	Rp.503.973.009.625,70	92,73

2017	Rp.487.767.039.131,00	Rp.465.120.608.561,97	95,36
2018	Rp.557.258.564.973,47	Rp.459.780.934.224,67	82,51
2019	Rp.929.455.439.343,05	Rp.836.619.827.526,07	90,01

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2020.

Tabel 1.1. Menunjukkan perbandingan antara belanja modal pada pemerintah yang kemudian menganggarkan dengan belanja modal riil, pada mula sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Sebagai dasar penelitian untuk mengetahui pengaruh diantara belanja modal pemerintah dengan peningkatan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah, maka data yang digunakan adalah belanja modal riil. Pada kegiatan belanja modal dalam penelitian yang saat ini dilakukan melihat daripada belanja tanah yang ada, pada peralatan dan mesin, bangunan dan juga gedung, jalan, irigasi serta jaringan, dan terakhir pada belanja aset tetap lainnya. Selain itu, data yang dipergunakan yakni dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 1.2
PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2019
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB Tahun Lalu	PDRB Tahun Berjalan	Persentase
2009	41.745,32	45.863,28	9,86
2010	45.863,28	51.752,07	12,84
2011	51.752,07	56.883,35	9,92
2012	56.883,35	62.447,77	9,78
2013	62.447,77	68.717,87	10,04
2014	68.717,87	71.677,53	4,31
2015	71.677,53	82.787,20	15,49
2016	82.787,20	91.014,57	9,94
2017	91.014,57	97.474,86	7,09
2018	97.474,86	103.593,34	6,28
2019	103.593,34	111.003,07	7,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2020.

Selanjutnya, Tabel 1.2. menunjukkan perubahan PDRB di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Tahun 2009-2019. Menghitung pertumbuhan ekonomi, maka inflasi dikecualikan sehingga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang ada dalam penelitian ini merupakan atas dasar harga konstan tahun 2000

Tabel 1.3
Belanja Modal dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2009-2019

Tahun	Belanja Modal (Dalam Miliar Rupiah)	Pertumbuhan PDRB (Dalam %)
2009	Rp.202.669.581.134,00	9,86
2010	Rp.203.792.300.548,09	12,84
2011	Rp.208.496.794.160,00	9,92
2012	Rp.324.862.320.287,00	9,78
2013	Rp.355.519.046.118,00	10,04
2014	Rp.276.831.808.150,00	4,31
2015	Rp.442.524.325.052,00	15,49
2016	Rp.503.973.009.625,70	9,94
2017	Rp.465.120.608.561,97	7,09
2018	Rp.459.780.934.224,67	6,28
2019	Rp.836.619.827.526,07	7,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2020.

Tabel 1.3. Menunjukkan belanja modal dari aktifitas pembangunan daerah yang mengarah pada peningkatan kualitas masyarakat. Pada dasarnya tiap-tiap pemerintah terus berupaya dalam peningkatan masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan melalui belanja modal yang dilakukan secara langsung, berharap dengan adanya anggaran untuk belanja modal dapat meningkatkan, mengembangkan, serta membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dimana masyarakat tidak akan mampu jika mengandalkan kondisi mereka tanpa bantuan dari pemerintah daerah (Sodik, 2007).

Tabel 1.4
Proporsi Belanja Operasional, Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009-2019

Tahun	Belanja Operasional		Belanja Modal		Total Belanja Daerah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2009	672.006.244.402,50	70,39	202.669.581.134,00	21,23	954.733.635.892,50
2010	830.007.786.955,20	73,63	203.792.300.548,09	18,08	1.127.256.721.108,89
2011	960.537.360.125,25	67,40	208.496.794.160,00	14,63	1.425.082.333.706,25
2012	1.350.882.871.565,02	67,11	324.862.320.287,00	16,14	2.013.021.759.959,27
2013	1.454.633.205.292,50	67,81	355.519.046.118,00	16,57	2.145.227.819.901,50
2014	1.728.875.337.982,50	70,69	276.831.808.150,00	11,32	2.445.861.248.020,50
2015	2.059.161.302.154,07	69,73	442.524.325.052,00	14,98	2.953.200.683.117,07
2016	2.188.486.346.310,54	68,86	503.973.009.625,70	15,86	3.178.114.481.725,24
2017	2.450.983.036.475,85	71,13	465.120.608.561,97	13,50	3.445.777.071.450,82
2018	2.656.048.547.377,50	73,21	459.780.934.224,67	12,67	3.628.013.037.630,17
2019	2.733.083.347.628,10	66,68	836.619.827.526,07	20,41	4.098.771.219.451,17
Total	19.084.705.386.269,00	766,63	4.280.190.555.387,50	175,39	27.415.060.011.963,40
Rata-Rata	1.734.973.216.933,55	69,69	389.108.232.307,96	15,94	2.492.278.182.905,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2020.

Tabel 1.4 Menunjukkan bahwa selama Tahun 2009-2019 proporsi pada belanja modal oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, trendnya mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Demikian pula halnya dengan proporsi belanja operasional cenderung mengalami fluktuasi, namun demikian terdapat 69,69 persen dari total keseluruhan belanja oprasional yang dapat di rata-ratakan dalam proporsi belanja daerah saat ini. Nilai tersebut justru lebih besar dari 15,94 persen jika dibandingkan dengan proporsi pada belanja modal. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah masih cukup membatasi dalam menetapkan kebijakan pengeluaran pada belanja modal yang ada dalam APBD, sehingga hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi beberapa fasilitas publik yang seharusnya di sediakan oleh pemerintah daerah termasuk ketersediaan infrastruktur guna penunjang masyarakat dalam peningkatan ekonomi yang pada dasarnya dibutuhkan sebagai salah satu alat untuk mendorong pemerintah dalam peningkatan ekonomi daerah khususnya pada komposisi belanja APBD perlu untuk di lakukan perubahan. Tingginya alokasi pada belanja modal secara tidak langsung akan berdampak sekaligus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil dari analisis pada regresi linear sederhana oleh bantuan aplikasi yang ditujukan untuk mengolah data statistik seperti SPSS diharapkan mampu untuk memperoleh intisari dari hasil-hasil riset yang sedang dilakukan pada dugaan pengaruh variable bebas (belanja modal pemerintah) oleh variable terikat (pertumbuhan ekonomi) di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2009-2019.

Tabel 1.5.
Hasil Perhitungan Regresi Linear Sederhana

		Coefficients ^a			
		Unstandardized	Standardized		
		Coefficients			
Model		B	Std. Error	t	Sig.
1	(Constant)	12.351	9.388	1.316	.221
	Belanja Modal	-.034	.107	-.107	.754
	Multiple R	=	0,107		
	R-Squared (R ²)	=	0,011		

a. *Dependent Variable:* Pertumbuhan Ekonomi

$Y=12,351-0,034X$ Persamaan regresi linear sederhana berikut menunjukkan pada variabel independen yaitu (belanja modal pemerintah) yang saat ini dianalisis menjawab bahwa adanya pengaruh negative dimana tidak berpengaruh signifikan atas pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Tengah rentang waktu 2009-2019. Hal ini merujuk pada pendapat Basuki dan Prawoto (2016) yang mengilustrasikan bahwa *Unstandardized Coefficient* B pada variabel inflasi, penjualan dan jumlah keuntungan. Pada bagian variabel penjualan memengaruhi nilai tambah yang ada dengan nilai sebesar 0,06 persen dimana bernilai positif dengan maksud bahwa semakin tinggi jumlah dari penjualan tersebut, maka akan semakin besar jumlah keuntungan yang akan di peroleh. Hasil analisis regresi linier sederhana memperlihatkan bahwa pada variabel (X) belanja modal pada pemerintah atas peningkatan tingkat ekonomi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah rentang waktu tahun 2009-2019, tidak adanya pengaruh signifikan, memberikan sebuah makna bahwa peran dari belanja modal pemerintah dalam dunia investasi di Provinsi Sulawesi Tengah kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis Proporsi

Analisis proporsi digunakan untuk mengukur besarnya tingkat proporsi pada kegiatan belanja modal terhadap jumlah akhir dari belanja yang di lakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui data APBD Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan proporsi belanja modal terhadap belanja yang saat ini dilakukan oleh daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009-2019, sebagaimana penyajian tabel 1.4. sebelumnya, diketahui bahwa nilai rata-rata proporsi pada kegiatan belanja modal oleh pemerintah terhadap belanja APBD daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009-2019 mencapai nilai 15,94 persen dinilai tidak sejalan dengan regulasi Permendagri pada nomor 13 di tahun 2006 yang seharusnya sebesar 21 persen dari keseluruhan belanja APBD, hal ini menunjukkan masih kurangnya pemerintah dalam membijaki aktifitas belanja modal pada APBD khususnya penyediaan infrastruktur publik, sehingga berdampak atas ketersediaan sarana dan prasana yang menunjang aktifitas ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Komposisi pada belaja APBD terjadi perubahan dimana, kebutuhan pemerintah pada belanja modal perlu untuk dapat segera di lakukan guna mendorong perekonomian daerah, seperti di ketahui bersama jika alokasi belanja modal semakin tinggi, maka target ketercapaian pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan berdampak signifikan.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah semakin membaik terbukti selama kurun waktu empat tahun terakhir, hal ini juga dapat terlihat atas kemajuan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, hal demikian didukung dengan adanya perbaikankwalitas iklim makro ekonomi yang dimana memperlihatkan bagian dari perkembangan nilai pertumbuhan ekonomi

10,91 persen dari total keseluruhan. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sulawesi Tengah dimana saat ini dasar harga yang sedang berlaku sejumlah 166.402.665 milyar rupiah. Dalam rangka pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, terlihat banyaknya sektor-sektor ekonomi yang tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dengan perbaikan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah sehingga ekonomi tumbuh dengan baik, selain itu dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada rentang waktu 2009-2019 berpengaruh negatif sehingga tidak signifikan oleh belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa proporsi belanja modal minimal 21 persen atas belanja modal APBD, hal ini tidak mampu tercapai dimana belanja modal pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini hanya 15,94 persen proporsi yang berbeda sehingga pengalokasiannya hanya mampu pada belanja barang dan jasa, olehnya itu pertumbuhan ekonomi hanya di dorong dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.

REFERENSI

- Abdullah. 2008, Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah.
- Agenor, Pierre R. dan Blanca Moreno-Dodson. 2006, Public Infrastructure and Growth: New Channels and Implications. World Bank Policy Research Working Paper 4064.
- Arini S, Prima Rosita, 2016. "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan" JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Vol 2 No 2. ISSN 2460-1233
- Arsyad, Lincolin. 2004, Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Boediono. 1992, Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE UGM, Yogyakarta.
- . 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Erlina dan Rasdianto. 2013, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Brama Ardian, Medan.
- Fajri, Ahmad, 2016. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Sumatra". 29 e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 5. No.1.
- Halim, Abdul. 2008, Akuntansi keuangan Daerah. Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Hendrawan, Satrio Dimas. 2019, Tantangan Belanja Pemerintah Di Sulawesi Tengah. djb.kemenkeu.go.id.
- Hermawati, Wulandari, 2018. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara, Tesis tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, Jakarta.
- Hilman, Hadikusuma. 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung.
- Indrawan. 2000, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.
- Jhingan, M.L. 1975, Teori Model-Model Pertumbuhan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2000, Economic Development and Planning. PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1999, Ekonomi Publik. Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad, (2000). "Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang", Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari dan Martini Mini. 1996, Penelitian Terapan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peacock, Alan T. dan Wiseman, Jack. 1961, The Growth of Public Expenditure Volatility In Indonesia Post-Reformation Era.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Jakarta.

- Priambodo, Agung, 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012, *Economics Development Analysis Journal* 3 (3) (2014), ISSN: 2252-6765.
- Prurnamasari. 2009. *Economic Growth and Income Inequality*. American Economic Riview.
- Rostow dan Musgrave. 1996, *Pembangunan Ekonomi*. Ekonomi Perencanaan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Siregar, Sofyan. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Kencana, Jakarta.
- Straub, Stephane. 2008, *Infrastructure and Growth in Developing Countries: Recent Advances and Research Challenges*. Working Paper. Development Research Department. Research Support Team. World Bank.
- Sukirno, Sadono. 2000, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sularso, Havid. 2011, *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. *Jurnal Media Riset Akuntansi*, Vol.1, No.2, ISSN: 2088-2106.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-UndangNo.33Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan
- Wahyudi, Tri Setyo. 2016, *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*, PT. Radja Grafindo Persada, Depok.
- Wardhana, Adhitya, Nury Effendi, Agus kurniawan. 2010. *Analisi Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Barat*. *Jurnal Ekonomi*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Waryanto, Puput. 2017, *Pengaruh Belanja Modal Terhdap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (Indonesian Treasury Review)*, Vol.2, No.1, 2017, Hal.3555.